

**PELANGGARAN PROSEDUR PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh

AKHMAD SUBARI
NIM. 100 211 0349

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
TAHUN 1437 H / 2015 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELANGGARAN PROSEDUR PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NAMA : AKHMAD SUBARI

NIM : 100 211 0349

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 02 November 2015

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Sabian Usman, SH, M. Si
NIP. 19631109 199203 1 004



Dr. Elvi Soeradi, MH
NIP. 19720708 199903 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dekan Fakultas Syari'ah



Mujib, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002



H. Syaikh, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Akhmad Subari

Palangka Raya, 02 November 2015

Kepada Yth.

Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di -

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : Akhmad Subari

NIM : 100 211 0349

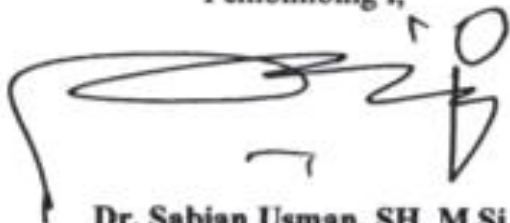
Judul : PELANGGARAN PROSEDUR PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Sabian Usman, SH, M.Si.
NIP. 19631109 199203 1 004

Pembimbing II,



Dr. Elvi Soeradji, MH.
NIP. 19720708 199903 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PELANGGARAN PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**, oleh Akhmad Subari, NIM. 100 211 0349 telah dimunaqasyahkan TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis,

Tanggal : 12 November 2015

Palangka Raya, 17 November 2015

Tim Penguji:

1. **Drs. Surya Sukti, MA**
Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

2. **H. Syaikhu, MHI**
Penguji I

(.....)

3. **Dr. Sabian Usman, SH, M.Si**
Penguji II

(.....)

4. **Dr. Elvi Soeradji, MHI**
Sekretaris/ Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syaria'ah,



H. Syaikhu, MHI

NIP. 19711107 199903 1 005

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **PELANGGARAN PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 02 November 2015

Yang Membuat Pernyataan,




AKHMAH SUBARI
NIM. 100 211 0349

PERSEMBAHAN

Karya Kecil ini aku persembahkan untuk orang tuaku tercinta almarhum ayah Rooseno Saïd Umar yang telah memberikan cahaya kehidupan sebagai isyarat kepadaku untuk terus berjuang meraih cita-cita dan ibu Nurhayati yang selalu menjadi matahari saat siang maupun malam bagiku.

kakak-kakakku Attur Muji, Mustifah, Taufiqurrahman, dan Ahmad Ranjani yang memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada adik kalian yang nakal ini.

ABSTRAK

Subari, Akhmad. 2015. *Pelanggaran Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palangka Raya*. Skripsi, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pembimbing I Dr. Sabian Utsman, M.Si. dan Pembimbing II Dr. Elvi Soeradji, M.H.

Pemerintah melalui PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pada Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Namun, pada kenyaaannya terdapat PNS yang diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa izin dari pejabat. Hal inilah yang menjadi fokus peneliti untuk mengkaji mengenai latar belakang pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya, subtansi pelanggaran prosedur perceraian PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya, dan dampak hukum pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologis guna mengkaji persepsi dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Selain itu juga mengumpulkan data dari informan-informan yaitu kuasa hukum dari PNS dan Pejabat yang berwenang. objeknya adalah pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan untuk pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. Sedangkan, data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *Conclusion*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya terdapat dua fakta, pertama disebabkan oleh PNS yang tidak memperoleh izin dari atasan namun tetap melakukan perceraian untuk memperoleh ketenangan batin. Kedua, disebabkan oleh atasan yang tidak memberikan izin dan juga tanggapan kepada bawahannya yang melakukan perceraian. Subtansi pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya yang difokuskan kepada *rasio decidendi* bagi hakim dalam memutus perceraian PNS yang tidak memperoleh izin dari atasan diperoleh bahwa hakim mempertahankan hukum perdata formal dan materiilnya. Sedangkan dampak hukum pelanggaran prosedur perceraian PNS di Pengadilan Agama akan dikenakan sanksi disiplin berat berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010.

Kata kunci: Pelanggaran Prosedur, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

ABSTRACT

Subari, Akhmad. 2015. Violations of Divorce Procedures for Civil Servants in religious court of Palangkaraya. Thesis, Department of Syari'ah, Ahwal Asy-shakhsiyyah Study Program, State Islamic Institute of Palangka Raya. Supervisor I Dr. Sabian Usman, M.Sc. and Supervisor II Dr. Elvi Soeradji, M.H.

Government through Government Regulation No. 45 of 1990 jo Government Regulation No. 10 1983 on Marriage and Divorce License For Civil Servants, in Article 3 paragraph (1) determine that the Civil Servants who will carry out a divorce must obtain a permit or certificate in advance of officials. However, in the reality Civil Servants who divorced terminated by the religious court of Palangkaraya had no permission from the authorities. This has become the focus of researcher to examine the background of the infringement procedure of divorce for Civil Servants in religious court of Palangkaraya, the substance of divorce procedure violations of Civil Servants in religious court of Palangkaraya, and the impact of law violations in divorce procedures for Civil Servants in the Religious Court of Palangkaraya.

This research is an empirical law research using qualitative descriptive approach and sociological approach in order to assess the perceptions and behavior that occur in the field of law. The data used in this study are primary data and secondary data. Subject in this study is a religious court judge Palangkaraya. It also collected data from informants such as the legal counsel of the Civil Service and the authorized official. The object is a violation divorce procedure for Civil Servants in religious court of Palangkaraya. The data were collected through interviews and documentation and the legitimation was through source triangulation techniques. Meanwhile, the data were analyzed through three stages; data reduction, data display, and conclusion.

These results indicate that the backgrounds of the infringement procedure of divorce for Civil Servants in religious court of Palangkaraya are two facts. The first is the Civil Servants who do not obtain permission from superiors but still do divorce to obtain inner peace. The second is the authorities who did not give permission and response to their staffs who divorced. The substance of divorce procedure violations for Civil Servants in the religious court of Palangkaraya that focused on the *ratio decidendi* for judges in deciding divorce for Civil Servants who did not obtain permission from the authorities showed that civil law judges maintain formal and material of the case. While the impact of the divorce procedure law violations of Civil Servants in the Religious Court will be subject of severe disciplinary sanctions based on Government Regulation No. 53 Year 2010.

Keywords: Procedure Violations, Divorce, Civil Servants

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan serta rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis untuk selalu bersabar dan terus berusaha sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PELANGGARAN PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PEGAWAIN NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”**, sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., karena atas segala perjuangan beliau saat ini penulis bisa menikmati indahny Islam dan Ihsan.

Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Ayahanda Rooseno Said Umar (Alm) dan Ibunda Nurhayati yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H, M.H., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
3. Yth. Bapak Syaikhu, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.

4. Yth. Drs. Surya Sukti, M.A., selaku Ketua Jurusan Syari'ah yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Yth. Bapak Dr. Sabian Usman, SH. M.Si., dan Dr. Elvi Soeradji, M.H., selaku pembimbing I dan II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat, do'a serta waktunya selama penulisan dan penulisan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
8. Seluruh subjek dan informan penelitian yang telah mau meluangkan waktu dan memberikan keterangan, informasi, dan data sehingga lancarnya proses penulisan.
9. Sahabat-sahabat AHS angkatan 2010, M. Ibrahim Ismail, Fitriadi, Ahmad Rafuan, Jumaidi, Indra Setiawan, Andrianto, Ahmad Zarkasi, Yakin Soleh, Humairah, Santi, Jauharatun Nafisah, Desy Sulistyowati, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
10. Seluruh teman-teman yang mendukung dan memberikan motivasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap

semoga skripsi ini bermanfaat, terlebih khusus bagi penulis pribadi. *Amin Yaa
Allah Ya Rabbal 'Alamin...*

Palangka Raya, 12 November 2015

Penulis

Akhmad Subari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Deskripsi Teoritik.....	10
1. Pengertian Pelanggaran	10
2. Pengertian Prosedur.....	10
3. Konsep Perceraian.....	11
a. Pengertian Perceraian	11
b. Alasan-alasan Perceraian.....	12
c. Asas Hukum Perceraian	13
4. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian.	18

5. Pengaturan Hukum Khusus Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	19
a. Pengertian dan Jenis Pegawai Negeri Sipil.....	19
b. Pertimbangan Pengaturan Hukum Khusus Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	22
c. Alasan-alasan Hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	24
d. Proses Hukum Perizinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	27
e. Putusnya Perkawinan Pegawai Negeri Sipil serta Tata Caranya.....	29
f. Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Peraturan Hukum Khusus Perceraian.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Pengabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	42
H. Sistematika Penulisan Hasil Penelitian.....	43
I. Kerangka Pikir Penelitian	44

BAB IV PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya.....	45
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya	47
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya	48
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya.....	50

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya	50
6. Susunan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.....	51
B. Tahap Pelaksanaan Penelitian	52
C. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya..	53
1. Subjek I.....	53
2. Subjek II	57
D. Wawancara dengan Informan.....	61
E. Wawancara dengan Pejabat yang Berwenang	65

BAB V PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pelanggaran Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palangka Raya	70
B. Substansi Pelanggaran Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palangka Raya	74
C. Dampak Hukum Pelanggaran Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palangka Raya	94

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	104
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SERTA KEDUDUKAN PENELITI.....	9
TABEL 2	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SERTA KEDUDUKAN PENELITI.....	50
TABEL 3	PERKARA PERCERAIAN PNS DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA.....	82
TABEL 4	PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS.....	95

DAFTAR SINGKATAN

BAKN	: Badan Administrasi Kepegawaian Negara
BKPP	: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Jo.	: Juncto
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MAPEK	: Majelis Pertimbangan Kepegawaian
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UUP	: Undang-undang Perkawinan